

---

## MENAKAR DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP MASA DEPAN PARIWISATA INDONESIA

Oleh

Rizal Kurniansah<sup>\*1</sup>, Ihyana Hulfa<sup>2</sup> & Hasnia Minanda<sup>3</sup>

Program Studi D3 Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram,  
Indonesia

Email: <sup>\*1</sup>[rizalkurniansah@unram.ac.id](mailto:rizalkurniansah@unram.ac.id), <sup>2</sup>[ihyanahulfa@unram.ac.id](mailto:ihyanahulfa@unram.ac.id),  
<sup>3</sup>[hasnia\\_minanda@unram.ac.id](mailto:hasnia_minanda@unram.ac.id)

### Abstrak

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata nasional, termasuk pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bagian integral dalam rantai pasok industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif dampak pemangkasan anggaran terhadap pengembangan destinasi pariwisata serta keberlangsungan UMKM di sektor ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh data primer dari Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan dan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi resmi, serta laporan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga lebih dari 40% berdampak pada penurunan intensitas promosi, perlambatan pembangunan infrastruktur destinasi, serta terbatasnya program pengembangan masyarakat. Efek lanjutan dari kebijakan ini juga dirasakan oleh UMKM yang mengalami penurunan permintaan, pembatasan ekspansi pasar, dan risiko berkurangnya akses pembiayaan. Penurunan aktivitas pariwisata secara keseluruhan berdampak pada turunnya okupansi hotel, lesunya sektor transportasi, hingga berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran harus diimbangi dengan strategi adaptif melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan community-based tourism agar sektor pariwisata tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal.

**Kata Kunci:** *Efisiensi Anggaran, Pariwisata Indonesia, UMKM, Promosi Digital, Community-Based Tourism.*

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini tidak hanya menyumbang pendapatan negara melalui devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan industri kreatif, serta memperkuat citra bangsa di kancah internasional. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman destinasi wisata yang mampu menarik jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia

memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas berbagai tantangan ekonomi global, termasuk penurunan pendapatan negara, defisit anggaran, serta kebutuhan untuk mengalokasikan dana ke sektor prioritas lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemangkasan anggaran di sektor pariwisata menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.

Efisiensi anggaran yang diterapkan mencakup pengurangan dana promosi wisata, pengembangan destinasi, serta penyelenggaraan berbagai acara pariwisata berskala nasional dan internasional. Dalam praktiknya, kebijakan ini berdampak pada



terhambatnya berbagai program pengembangan pariwisata yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa destinasi yang tengah berkembang mengalami perlambatan pembangunan infrastruktur, sedangkan destinasi yang telah mapan menghadapi penurunan intensitas promosi sehingga berpotensi kehilangan daya saing di pasar global.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pariwisata Indonesia di masa depan. Destinasi yang kurang mendapat perhatian dalam hal pengelolaan dan promosi berisiko mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kualitas layanan pariwisata, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Akibatnya, kepuasan wisatawan dapat menurun, yang pada gilirannya berdampak pada citra pariwisata Indonesia.

Selain itu, dampak pemangkasan anggaran dirasakan oleh pelaku industri pariwisata, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada arus wisatawan. Berkurangnya jumlah wisatawan berarti menurunnya pendapatan bagi para pelaku usaha, mulai dari penyedia akomodasi, transportasi, kuliner, hingga industri kerajinan tangan. Hal ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memperlambat pemulihan ekonomi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama.

Di beberapa daerah yang tengah melakukan pengembangan pariwisata. Proyek pengembangan infrastruktur yang bertujuan mendukung percepatan sektor pariwisata kerap menghadapi hambatan akibat keterbatasan dana. Padahal, destinasi-destinasi tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan nasional. Meskipun demikian, kebijakan efisiensi anggaran juga dapat dilihat sebagai peluang untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah daerah dan pelaku industri didorong untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti

melalui kolaborasi dengan pihak swasta, investasi asing, dan pemanfaatan dana hibah internasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran menjadi solusi efektif dengan biaya yang lebih efisien.

Dalam konteks keberlanjutan pariwisata, kebijakan efisiensi anggaran menuntut adanya keseimbangan antara penghematan biaya dan upaya menjaga kualitas destinasi. Pendekatan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) dan ekowisata menjadi relevan sebagai strategi pengembangan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dampak pemangkasan anggaran dapat diminimalisir, sekaligus menciptakan model pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menakar secara cermat dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap masa depan pariwisata Indonesia. Penelitian mengenai isu ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang implikasi kebijakan tersebut, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pariwisata.

Data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas lokal. Selain itu, studi dokumen digunakan untuk mengkaji laporan kebijakan, publikasi resmi, serta data statistik terkait sektor pariwisata. Analisis data dilakukan secara deskriptif



kualitatif untuk menginterpretasikan temuan lapangan dalam konteks keberlanjutan pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata di Indonesia

Pariwisata merupakan sektor strategis yang tidak hanya berkontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui devisa, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, serta sarana diplomasi budaya. Namun, sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global maupun kebijakan nasional, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Indonesia menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan anggaran yang signifikan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 berdampak signifikan terhadap pengembangan destinasi wisata di Indonesia dengan beberapa pengaruh utama sebagai berikut:.

### **Pemangkasan Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pada tahun anggaran terkini, Kemenparekraf mengalami pemangkasan anggaran lebih dari 40 persen. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,49 triliun dipangkas menjadi Rp884,9 miliar. Penurunan anggaran yang drastis ini berdampak langsung pada kemampuan kementerian dalam menjalankan program-program strategisnya. Kegiatan promosi pariwisata internasional yang selama ini menjadi ujung tombak peningkatan kunjungan wisatawan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak (Media, 2025; Portal, 2025; Wicaksono, 2025).

Pengurangan ini secara otomatis menghambat upaya untuk memasarkan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di panggung global. Padahal, promosi yang konsisten dan masif sangat dibutuhkan, terutama di masa pemulihan pascapandemi

COVID-19, ketika negara-negara berlomba merebut kembali perhatian wisatawan internasional.

### **Pengurangan Promosi dan Kehilangan Momentum Pasar Wisatawan Internasional.**

Efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya intensitas kampanye pariwisata Indonesia di luar negeri. Akibatnya, Indonesia berisiko kehilangan momentum pemulihan sektor pariwisata yang baru mulai menunjukkan tren positif. Negara-negara pesaing seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia justru meningkatkan anggaran promosi dan pengembangan infrastruktur untuk menarik wisatawan global. Mereka memanfaatkan situasi pascapandemi untuk memperluas pangsa pasar (Portal, 2025).

Jika Indonesia tidak mampu mempertahankan eksistensinya di pasar internasional, maka posisi daya saingnya akan melemah. Promosi bukan hanya tentang menarik kunjungan, tetapi juga membentuk persepsi dan citra destinasi di benak wisatawan global. Kehilangan momentum promosi berarti memberi ruang bagi negara lain untuk merebut pangsa pasar yang seharusnya bisa diraih Indonesia.

### **Penurunan Kunjungan Wisatawan dan Dampak Ekonomi**

Dampak lanjutan dari kebijakan efisiensi ini terlihat pada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang berimbas langsung pada perekonomian. Berdasarkan kajian empiris, setiap penurunan belanja pemerintah di sektor pariwisata sebesar 1 persen dapat menurunkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 0,3 hingga 0,5 persen. Angka ini menjadi indikasi bahwa investasi pemerintah sangat berpengaruh terhadap performa sektor ini (Antara, 2025; Rahmad, 2025).

Ketika kunjungan wisatawan menurun, berbagai sektor pendukung pun terkena dampaknya. Tingkat hunian hotel berkurang, pendapatan pelaku usaha kecil menurun, dan lapangan kerja di sektor pariwisata pun ikut menyusut. Industri pariwisata yang padat



karya dan banyak mengandalkan sektor informal menjadi sangat rentan terhadap penurunan aktivitas. Pada akhirnya, efek domino ini berujung pada berkurangnya pendapatan daerah dan menurunnya kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

### **Pembatasan Kegiatan dan Program Pengembangan**

Efisiensi anggaran juga menyebabkan pembatasan sejumlah kegiatan kementerian yang bersifat non-fisik, namun krusial bagi pengembangan destinasi. Kegiatan seperti pelatihan masyarakat, diskusi kelompok terfokus (FGD), seminar, publikasi penelitian, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat terbatas (ANTARA, 2025; Portal, 2025).

Padahal, kegiatan-kegiatan ini berperan penting dalam membentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang memadai, masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan destinasi akan kesulitan mengikuti perubahan tren wisata dan tuntutan pasar global. Ketika inovasi produk wisata tidak difasilitasi, maka destinasi akan kehilangan daya tariknya dan stagnan dalam pengembangan.

### **Pengaruh Terhadap Infrastruktur dan Investasi Pariwisata**

Salah satu dampak jangka panjang dari pemangkasan anggaran adalah tertundanya pengembangan infrastruktur pariwisata. Proyek-proyek pembangunan akses jalan menuju destinasi, penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya menjadi kurang prioritas karena keterbatasan anggaran. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada daya tarik destinasi baru maupun eksisting (Dana, 2025).

Kurangnya dukungan infrastruktur juga mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata. Investasi membutuhkan kepastian dan dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur dasar yang memadai. Ketika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka peluang pertumbuhan destinasi akan semakin sempit,

dan efek multiplier ekonomi dari sektor pariwisata pun berkurang.

Kebijakan efisiensi anggaran terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dampak multidimensional terhadap pengembangan destinasi wisata. Penurunan anggaran bukan hanya mengurangi kapasitas promosi dan pembangunan fisik, tetapi juga membatasi ruang inovasi dan partisipasi masyarakat. Dalam jangka pendek, hal ini berisiko menurunkan jumlah wisatawan, pendapatan daerah, serta peluang kerja. Dalam jangka panjang, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan pariwisata global.

Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu dibarengi dengan inovasi kebijakan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa meskipun anggaran terbatas, program yang dilaksanakan tetap fokus, berdampak langsung, dan memiliki keberlanjutan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, sektor pariwisata Indonesia dapat tetap tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

### **Pengaruh Pemangkasan Anggaran terhadap Pelaku Industri Pariwisata, Terutama UMKM.**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Sebagian besar dari pelaku UMKM sangat tergantung pada aktivitas pariwisata dan belanja pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan efisiensi anggaran—khususnya di sektor pariwisata, promosi, serta kegiatan pemerintahan—telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Penurunan permintaan yang berasal dari kegiatan yang disponsori pemerintah menciptakan efek domino yang cukup kompleks terhadap ekonomi lokal dan regional.

### **Pemangkasan Anggaran dan Turunnya Permintaan Produk UMKM.**

Salah satu dampak langsung dari



kebijakan efisiensi anggaran adalah berkurangnya belanja untuk kegiatan promosi, pengadaan cinderamata, dan pelaksanaan event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions). Padahal, selama ini kegiatan tersebut menjadi pasar penting bagi pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor kerajinan tangan, suvenir, makanan khas, dan produk ekonomi kreatif (Bali, 2025; kumparan, 2025).

Kegiatan pemerintah, seperti seminar nasional, pelatihan, atau kunjungan kerja, biasanya membutuhkan pengadaan paket suvenir, katering lokal, dan jasa pendukung lainnya. Ketika anggaran untuk kegiatan ini dipotong secara signifikan, permintaan terhadap produk dan jasa UMKM ikut menurun. Pelaku usaha kecil kehilangan pesanan rutin, perajin tidak lagi mendapatkan proyek besar, dan vendor lokal kesulitan mempertahankan cash flow usahanya. Akibatnya, banyak UMKM terpaksa memangkas operasional, mengurangi produksi, bahkan merumahkan tenaga kerja.

Efek Domino pada Ekonomi Lokal dan Daerah Penurunan permintaan terhadap produk UMKM tidak berdiri sendiri, tetapi menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lain yang berkaitan erat dengannya.

Berdasarkan data dari sektor pariwisata, akomodasi dan makanan-minuman mengalami kontraksi hingga 10,22% akibat berkurangnya mobilitas dan konsumsi pemerintah. Sektor ini merupakan mitra utama UMKM lokal, sehingga kontraksi yang terjadi berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha mereka (Rahmad, 2025).

Penurunan aktivitas ekonomi dari sektor hulu ke hilir ini juga merambat ke sektor perdagangan, transportasi, jasa logistik, bahkan sektor pertanian lokal sebagai penyedia bahan baku. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak hanya UMKM yang terpukul, tetapi juga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional antara 1,10 hingga 1,89% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diperkirakan oleh beberapa lembaga riset

ekonomi, (Estherina, 2025; Fajrul, 2025; Primantoro, Nugraha, & Pusparsa, 2025; Santia, 2025; Universitas, 2025).

### **Turunnya Kunjungan dan Okupansi Hotel: Rantai Dampak pada UMKM.**

Salah satu sektor yang terkena dampak langsung dari pengurangan perjalanan dinas pemerintah dan kegiatan MICE adalah perhotelan. Hotel-hotel bisnis dan konvensi yang selama ini sangat bergantung pada acara pemerintah mengalami penurunan okupansi signifikan. Ketika hotel sepi, maka permintaan terhadap berbagai jasa pendukung juga menurun mulai dari katering, laundry, pengadaan suvenir, hingga hiburan lokal (Henry, 2025; Kumparan, 2025).

UMKM yang sebelumnya menjadi vendor tetap bagi hotel dan penyelenggara event mengalami penurunan pesanan secara drastis. Dalam jangka pendek, hal ini memengaruhi pendapatan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan penutupan usaha, pengangguran baru, dan kerugian sosial-ekonomi lainnya, khususnya di daerah yang menggantungkan ekonomi lokalnya pada wisata konvensi dan bisnis.

### **Penghambat Ekspansi dan Penguatan Pasar UMKM**

Dengan semakin berkurangnya dukungan promosi dan event pariwisata yang biasanya melibatkan UMKM, maka ruang gerak pelaku usaha mikro semakin terbatas. Event-event seperti pameran pariwisata, festival daerah, atau promosi nasional ke luar negeri biasanya menjadi media efektif untuk memperluas pasar dan menjangkau pelanggan baru. Ketika event-event ini dikurangi atau ditiadakan, maka kesempatan UMKM untuk memperluas pasar dan membangun jejaring bisnis ikut menghilang (kumparan, 2025).

Bagi banyak pelaku usaha kecil, keberadaan kegiatan pemerintah juga menjadi validasi dan dukungan psikologis terhadap eksistensi produk mereka. Tanpa panggung promosi yang memadai, UMKM sulit bersaing dalam pasar digital yang lebih luas. Hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis





lokal.

### **Risiko Berkurangnya Akses Pembiayaan dan Program Penguatan**

Efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dan daerah berimbas pada banyak program pembiayaan UMKM. Skema-skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat produksi, pelatihan manajemen usaha, dan pendampingan bisnis berpotensi mengalami pengurangan atau keterlambatan penyaluran (kumparan, 2025).

Padahal, dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan tekanan ekonomi global, UMKM sangat membutuhkan insentif dan dukungan modal untuk bisa bertahan dan berkembang. Jika program-program pembiayaan dan pengembangan ini terganggu, maka akan semakin sulit bagi pelaku UMKM untuk melakukan inovasi, memperbaiki kualitas produk, atau menjangkau pasar baru.

### **Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Pendapatan Daerah**

UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Ketika sektor ini terpukul, maka dampak terhadap ketenagakerjaan sangat besar. Banyak pekerja informal atau musiman yang kehilangan pekerjaan tanpa ada perlindungan sosial yang memadai. Ini menciptakan tekanan sosial dan meningkatkan angka pengangguran serta kemiskinan di daerah (Henry, 2025; Kumparan, 2025).

Selain itu, sektor pariwisata dan UMKM juga menjadi kontributor penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan. Ketika aktivitas ekonomi di sektor ini menurun, maka PAD ikut merosot. Pemerintah daerah pun mengalami keterbatasan fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Situasi ini menciptakan siklus negatif yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

### **Turunnya Aktivitas Transportasi dan Distribusi Produk UMKM**

Aspek lain yang terdampak adalah penurunan aktivitas transportasi, khususnya

penerbangan domestik. Pemangkasan perjalanan dinas menyebabkan berkurangnya pergerakan orang dan barang antarwilayah. Hal ini mempengaruhi distribusi produk UMKM yang selama ini memanfaatkan jalur transportasi udara, terutama untuk produk-produk oleh-oleh atau makanan cepat saji yang harus dikirim segar (Andri, 2025).

Beberapa pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar antar daerah karena ongkos logistik meningkat ketika volume pengiriman menurun. Akibatnya, daya saing produk UMKM melemah, dan potensi ekspansi pasar ke luar daerah menjadi terbatas.

Situasi ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara kebijakan anggaran pemerintah dan keberlangsungan usaha UMKM di sektor pariwisata. Ketika belanja negara dikurangi secara drastis tanpa strategi mitigasi yang tepat, maka pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak, baik dari sisi pendapatan, tenaga kerja, maupun akses pasar.

Untuk itu, perlu ada pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat untuk menjaga keberlanjutan UMKM di tengah keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk promosi lokal, pengembangan desa wisata, atau inkubasi UMKM. Selain itu, pemanfaatan platform digital, kolaborasi dengan e-commerce, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif menjadi solusi jangka menengah yang dapat dikembangkan.

Hanya dengan pendekatan yang inklusif, strategis, dan adaptif, UMKM dapat bertahan dalam tekanan dan tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional.

### **PENUTUP**

Kebijakan efisiensi anggaran di sektor pariwisata telah menimbulkan dampak struktural terhadap pengembangan destinasi dan kelangsungan pelaku usaha, khususnya UMKM. Pengurangan anggaran berdampak



langsung pada penurunan promosi, pembatasan kegiatan pengembangan, dan melambatnya pembangunan infrastruktur pendukung destinasi. UMKM sebagai mitra utama dalam sektor ini mengalami penurunan permintaan produk, terbatasnya pasar, dan berkurangnya akses pembiayaan, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Efek domino dari kebijakan ini tidak hanya merugikan sektor pariwisata tetapi juga melemahkan ekonomi lokal melalui penurunan okupansi hotel, lesunya sektor transportasi, serta turunnya pendapatan daerah. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu diarahkan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas; optimalisasi promosi digital; serta penguatan model pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Pendekatan adaptif ini penting agar sektor pariwisata dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang luas meskipun di tengah keterbatasan fiskal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri, M. A. (2025). Pemangkasan Anggaran Tekan Pariwisata dan Transportasi, Dampaknya bisa Berkepanjangan. Retrieved June 4, 2025, from <https://industri.kontan.co.id/news/pemangkasan-anggaran-tekan-pariwisata-dan-transportasi-dampaknya-bisa-berkepanjangan>
- [2] Antara. (2025). Kemenpar bahas dampak efisiensi bagi sektor pariwisata bersama PHRI. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4790633/kemenpar-bahas-dampak-efisiensi-bagi-sektor-pariwisata-bersama-phri>
- [3] ANTARA, N. (2025). Efisiensi anggaran dorong Kementerian Pariwisata perkuat kolaborasi. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4634925/efisiensi-anggaran-dorong-kementerian-pariwisata-perkuat-kolaborasi>
- [4] Bali, P. (2025). Efisiensi Anggaran Berdampak bagi Industri MICE. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.balipost.com/news/2025/02/11/441481/Efisiensi-Anggaran-Berdampak-bagi-Industri...html>
- [5] Dana, U. (2025). Terkena Dampaknya! 5 Imbas Efisiensi Anggaran 2025 Terhadap Investasi. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.lbs.id/publication/berita/7-dampak-efisiensi-anggaran-2025-investasi-juga-kena>
- [6] Estherina, I. (2025). Imbas Perang Dagang, PIER Revisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 hanya 4,5-5 Persen. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.tempo.co/ekonomi/imbaspengaruh-dagang-pier-revisi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2025-hanya-4-5-5-persen-1434208>
- [7] Fajrul. (2025). PIER Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Melambat Jadi di Bawah 5%. Retrieved June 4, 2025, from <https://mediaasuransinews.co.id/ekonomi-bisnis/pier-proyeksikan-pertumbuhan-ekonomi-ri-2025-melambat-jadi-di-bawah-5/>
- [8] Henry. (2025). Anggaran Pemerintah Dipangkas, PHRI: Berpotensi Banyak Terjadi PHK dan Penurunan Pendapatan sampai 70 Persen. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5920880/anggaran-pemerintah-dipangkas-phri-berpotensi-banyak-terjadi-phk-dan-penurunan-pendapatan-sampai-70-persen>
- [9] kumparan. (2025). Efisiensi Anggaran Bakal Beri Dampak ke UMKM Pariwisata. Retrieved June 4, 2025, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/efisiensi-anggaran-bakal-beri-dampak-ke-umkm-pariwisata-24X095zw9rG>
- [10] Kumparan. (2025). Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Hotel dan UMKM Bakal Lesu. Retrieved June 4,



- 2025, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/p-rabowo-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-hotel-dan-umkm-bakal-lesu-24NUYR7S6sr>
- [11] Media, D. (2025). Komisi VII Setujui Efisiensi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2025. Retrieved June 4, 2025, from <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/14/komisi-vii-setujui-efisiensi-anggaran-kementerian-pariwisata-tahun-2025/>
- [12] Portal, A. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran 2025 Terhadap Industri Pariwisata. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.portalanalisa.com/index/read/4507/dampak-efisiensi-anggaran-2025-terhadap-industri-pariwisata>
- [13] Primantoro, A. Y., Nugraha, D. W., & Pusparisa, Y. D. R. (2025). Proyeksi Ekonomi Lesu, Indonesia Masih Bisa Jadi Negara Maju? Retrieved June 4, 2025, from <https://www.kompas.id/artikel/proyeksi-ekonomi-lesu-indonesia-masih-bisa-jadi-negara-maju>
- [14] Rahmad, M. (2025). Pariwisata di Tengah Badai Pemangkasan Anggaran. Retrieved June 4, 2025, from <https://amphuri.org/pariwisata-di-tengah-badai-pemangkasan-anggaran/>
- [15] Santia, T. (2025). Ekonomi Indonesia Melambat di Kuartal I 2025, Ternyata Gara-gara Ini - Bisnis Liputan6.com. Retrieved June 4, 2025, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6024175/ekonomi-indonesia-melambat-di-kuartal-i-2025-ternyata-gara-gara-ini>
- [16] Universitas, I. (2025). Indonesia Economic Outlook 2025: Stagnasi Sekuler - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Retrieved June 4, 2025, from <https://lpem.org/seri-analisis-makroekonomi-indonesia-economic-outlook-2025/>
- [17] Wicaksono, S. (2025). Ke Mana Arah Target Pariwisata Dampak Efisiensi Anggaran? Retrieved June 4, 2025, from <https://validnews.id/kultura/ke-mana-arrah-target-pariwisata-dampak-efisiensi-anggaran>